

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP FUNGSI DAN
KEWENANGAN NEGARA DALAM MEMELIHARA FAKIR MISKIN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

OLEH :

NABILA SAVITRI

NPM: 1621020286

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP FUNGSI DAN
KEWENANGAN NEGARA DALAM MEMELIHARA FAKIR MISKIN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah



OLEH :

NABILA SAVITRI

NPM. 1621020286

Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Negara kesatuan republik Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali fakir miskin yang kita jumpai. Hal ini disebabkan karena tidak berjalannya fungsi dan kewenangan negara terhadap fakir miskin yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam ajaran Islam berlaku adil dan berbuat baik terhadap adalah salah satu prinsip Islam yaitu dapat memberikan hak bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 36 dan QS. An-Nisa: 58. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin. Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mungkin fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin dan untuk mengetahui sejauh mungkin pandangan siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengolahan data adalah editing, coding, dan rekonstruksi data. Metode analisis data secara kualitatif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin belum berjalan secara optimal karena kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut sehingga undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur fakir miskin tidak terealisasi dengan baik dan tidak berjalan efektif. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin, agar pemerintah berbuat adil dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan hak asasi yang harus didapatkannya. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan berbuat adil terhadap masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan dibawah ini :

: Nabila Savitri

: 1621020286

Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

: Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi
dengan judul : *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan
Peran Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin dan Anak Terlantar*,
adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya.
Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya
tanggung jawab saya.

Surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya,
tidak dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



NABILA SAVITRI
NPM.1621020286



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Nabila Savitri

NPM : 1621020286

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Pembimbing I,

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,

Arif Fikri, S.H.I., M.ag.
NIP. -

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin” Disusun oleh : Nabila Savitri, NPM: 1621020286, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal: 30 November 2020

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : H. Rohmat, S.ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Arif Fikri, S.H.I., M.ag.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^١ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٢ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء : ٣٦)

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang
jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”¹*

(QS. An-Nisa [4]:36)



¹QS. An-Nisa [4]:36

PERSEMBAHAN

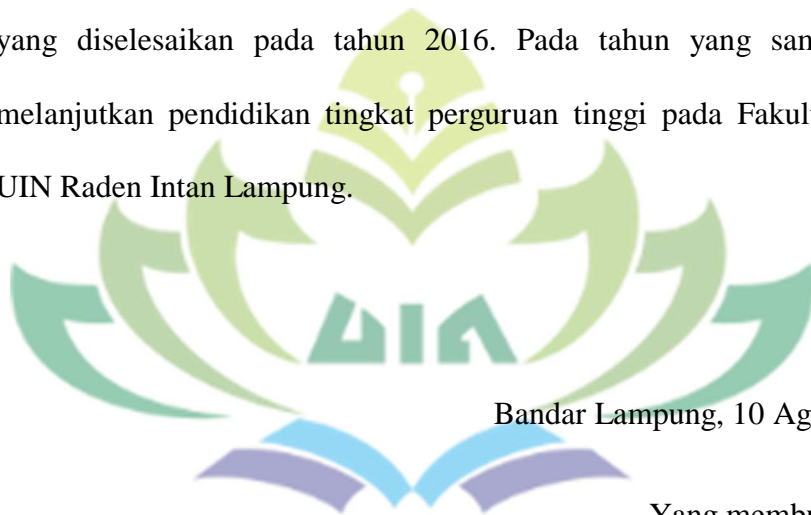
Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ibu dan bapak yang sangat aku sayangi Suwarno dan Nur Zulaikhah, yang sudah membesarkan dan mendidik sedari aku kecil hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi support system yang luar biasa, dan selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkahku.
2. Kakak-kakak dan adik yang kucintai Desti Wulandari, Nur Kholifah, dan Kurnia Indah Sari. Support system setelah ibu dan bapak yang selalu ngasih semangat dan dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 16 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Kelas E. Semangat berjuang!
4. Untuk diri saya sendiri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan untuk bisa menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah berusaha dan tidak menyerah.

5. Edo Novendra, selalu ngaasih semangat dan ngingetin untuk gak males buat ngerjain skripsi, pengen banget untuk bisa selalu nemenin bimbingan hehe, yang pasti selalu sabar banget ngadepin aku yang moody-an. Terimakasih banyak!
6. Chintya, Dimas, Ayu Sarah, Dewi, Fivi, Nevia (Yangti), terimakasih sudah saling membantu satu sama lain, saling mendukung dan saling pengertian. Terimakasih sudah manjadi cerita dimasa perkuliahan!
7. Violeta, Wardah, Monice, Nindita, Tiwi, sahabat-sahabat sedari putih abu-abu yang menjadi support system juga setelah keluarga, yang gak pernah berenti ngasih semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, selalu menjadi pendengar yang baik untuk dengerin segala keluh kesah gue hehe. Terimakasih banyak!
8. Eksa, Lulu, Tia (Fantastic Four) sahabat-sahabat sedari kecil yang selalu mendukung, dan juga menjadi moodbooster disaat jenuh. Terimakasih guys!
9. Teman-teman KKN 26 yang super baik, yang juga selalu mendukung dan support satu sama lain. Terimakasih sekali, See u top guys!
10. Para dosen dan staff di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nabila Savitri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 November 1998, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Suwarno dan Nur Zulaikhah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 6 Gedong Air pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan studi di SMP Perintis 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan melanjutkan studi di SMA N 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Yang membuat,

Nabila Savitri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin).

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku pembimbing I sekaligus sebagai penguji II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi

dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.ag. selaku pembimbing II yang sangat baik dan telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Penulis,

Nabila Savitri

NPM. 1621020286

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fakir Miskin Dalam Hukum Islam	13
B. Siyasah Dusturiyah.....	22
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
2. Dasar-Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	25
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	30
4. Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	40
C. Tinjauan Pustaka	44

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG NEGARA DALAM MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN)

A. Hak-Hak Fakir Miskin.....	47
B. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin	50

C. Peran Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin.....	53
----------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISA DATA

A. Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	61
B. Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin Perspektif Siyasah Dusturiyah	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

1. Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin(Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).²
2. Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.³
3. Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kerja suatu bagian tubuh.⁴
4. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang

²Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)* (Jakarta: PT Asdi Mahatasya, 2007), h. 32.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h.15.

⁴Setya Nugraha Maulina, *Kamus Bahasa Indonesia*(Surabaya: Karina), h.198

pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.⁵

5. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁶
6. Memelihara adalah kata “pelihara” merupakan 1) menjaga (membela, merawat, menyelenggarakan, dsb) baik-baik 2) mengusahakan (mengelola, memiara, mendidik) baik-baik 3) memiara atau menernakan (binatang) 4) menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya.⁷
7. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁸

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah untuk menganalisis fungsi dan kewenangan pemerintah dalam memelihara fakir miskin terkait dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁵Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang*(Jakarta: Kencana, 2016),h. 69.

⁶A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 135.

⁷W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2006), h.860.

⁸Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 ayat (1).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain:

1. Alasan Objektif

- a. Kajian tentang fungsi dan wewenang negara dalam memelihara fakir miskin masih perlu dibahas karena sesuai dengan fenomena yang terjadi.
- b. Memahami dan memperluas wawasan terkait fungsi dan kewenangan negara yang memiliki andil dalam pembelaan atas hak asasi manusia terhadap hak rakyat.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
- b. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.⁹ Dasar filosofis negara Indonesia adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar yang

⁹Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005),h. 20.

mencangkup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologi untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita nasional indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.¹⁰ Dalam memenuhi hak dan tanggung jawab, tugas dan wewenang negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.¹¹

Di Indonesia sendiri masih belum begitu maksimal dalam penanganan fakir miskin. Berdasarkan data pencarian sementara yang diambil melalui internet, dalam kategori anak terlantar sebanyak 6.95 persen balita dan

¹⁰Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

sebanyak 1.60 persen anak usia 5-17 tahun. Pada kategori tersebut persentase anak terlantar di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan.¹²

Sedangkan Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).¹³

Karena masih banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi yaitu bergelandang dan meminta-minta yang dilakukan orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan lansia. Hal ini dilakukan karena kurangnya kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi dirinya dan keluarga. Untuk melaksanakan

¹²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (On-line), tersedia di: <http://www.kemenpppa.go.id> (27 maret 2020 pukul 15.49)

¹³Badan Pusat Statistik (OnLine), tersedia di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (30 maret 2020 pukul 12.13)

tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Bukan hanya dalam program perlindungan sosial saja, tetapi juga harus masuk kedalam ranah membina fakir miskin yang sifatnya mandatory atas kewajiban tersebut. Orientasinya harus bersifat pemberdayaan yang dapat membangun kehidupan yang layak dengan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak asasi manusia yang secara kodrat dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir yang bersifat universal untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi. Mengenai kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangnya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.

Islam menganjurkan umat untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Dalam al-Qur'an dijelaskan secara jelas dalam firman Allah SWT

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
(النساء : ٣٦)

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”¹⁴ (Q.S An-Nisa [4]:36)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kepada seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, berbuat baik dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan kepada semua orang. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah islam. Sebagai contoh fakir miskin dan anak terlantar yang memiliki hak dalam kesejahteraan sosial yang sudah di atur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam Syariah-Nya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Terhadap Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”

¹⁴ QS. An-Nisa [4]:36

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)

E. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin.
2. Untuk mengkaji pandangan siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin.

G. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada

pembaca mengenai fungsi dan wewenang negara dalam pandangan siyasah dusturiyah mengenai pemeliharaan fakir miskin.

2. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku. Literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵
- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 3.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah nash Al-Qur'an, as-Sunnah, *Fiqh Siyasah* Undang-undang Dasar 1945.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa, dan sebagainya.¹⁶
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan perundangan-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data yang berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah tentang fungsi dan kewenangan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

¹⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 157.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi. Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber al-Quran dan as-Sunnah.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan

metode ini penulis dapat menyaring atau menimbng data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fakir Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal. Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.¹⁷

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹⁸

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak beharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain. Chambers dalam nasikum (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*). Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

¹⁷Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 16.

¹⁸Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1

1. Kemiskinan absolut adalah bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural ialah mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural adalah situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.¹⁹ Pihak yang berperan besar dalam kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin. Tidak mengeluarkan kebijakan yang pro kepada masyarakat miskin, kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan.

¹⁹Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.3.

5. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengurangan yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk :

- a. Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum.
- c. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman.
- d. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau.
- e. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan.
- f. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan.
- g. Hak rayat untuk memperoleh keadilan.
- h. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan.
- i. Hak rakyat untuk berinovasi.
- j. Hak rakyat menjalankan hubungan spiritual dengan Tuhan.
- k. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Shahdan 2015).²⁰

Ciri-ciri kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi. Namun dengan demikian ciri-ciri kemiskinan juga erat kaitannya dengan aspek material, sosial, kultural, dan struktural. Karena kemiskinan berhubungan dengan:

²⁰*Ibid*, h.5.

1. Kekurangan materi

Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.

2. Rendahnya penghasilan dan kekayaan yang memadai

Makna memadai sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.

3. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial

Keterkaitan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai suatu kelengkapan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Adapun sembilan ciri yang menandai kemiskinan, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
3. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil).

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya keterampilan, dan pendidikan) dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air)
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset) maupun misal (rendahnya media sosial, ketiadaan fasilitas umum).
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian memadai dan beresinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi).
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).
9. Ketertiban dalam kegiatan sosial maupun masyarakat.

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda, yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kekafiran), *al-a'ilat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu), dan *al-dhaif* (lemah). Dari kosa kata tersebut menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Peraturan-peraturan dalam syariat Islam itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk. Tujuannya itu tidak melampaui salah satu dari tiga perkara ini, kebutuhan pokok, keperluan (biasa), dan kesempurnaan (keperluan *scandary*). Adapun kebutuhan pokok itu artinya ialah yang tidak boleh tidak harus dipenuhi guna mendapatkan kemaslahatan, baik dari segi agama maupun keduniaan, jika hal ini tidak dapat dijamin terlaksananya, maka jalan kehidupan serta kemaslahatan keduniaan itu tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Kehidupan sosial menurut Islam, yaitu:²¹

1. Hak-hak asasi bagi setiap warga negara
2. Undang-undang yang menjamin berlakunya hak-hak itu serta penertiban jalannya.
3. Undang-undang yang menjamin terwujudnya perlindungan masyarakat.
4. Pengokoh-pengokoh yang dapat menegakkan terlaksananya undang-undang dan peraturan diatas.

Pada tahun 16 H, bangunan lembaga Baitul Mal pertama, sekaligus sebagai perealisasiian salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi jaminan sosial, khalifah umar Ibn al-Khattab membentuk sistem diwan yang menurut

²¹ Mustafa husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm.63

pendapat terkuat mulai dipraktekan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar Ibn al-Khattab mendirikan beberapa dapertemen yang dianggap perlu salah satunya seperti: Dapertemen Jaminan Sosial, dapertemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.²²

Pada masa pemerintahanya, khalifah Umar Ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapat negara menjadi empat bagian, yaitu:

1. Pendapatan zakat dan *u'shr* (pajak tanah)

Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan di bagikan kepada delapan *ashnaf*.

2. Pendapatan *khums* dan sedekah

Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau tidak.

3. Pendapatan *kharaj*, *pai*, *jizyah*, *u'shr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah

Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

²² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h.93.

4. Pendapatan lain-lain

Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Jaminan sosial nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberikan kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utama bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Membina nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara ditunjukkan untuk membina hubungan timbal balik antara rakyat dengan kepala negara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:²³

1. Kepala negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyatnya.
2. Kepala negara menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran serta tanggung jawab terhadap rakyatnya.
3. Dalam penerapan undang-undang kepala negara tidak membedakan latar belakang status sosial.

Dan sebaliknya dalam kedudukan sebagai rakyat, kaum muslimin diharuskan untuk menjalankan kewajiban dalam bentuk aktifitas yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti:

²³ Jalaludin, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 103.

1. Mentaati peraturan dan taat kepada kepala negara yang melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Menyiapkan diri untuk membela negara
3. Menjauhkan diri dari segala tindakan yang merugikan negara

Dari 10 kata fakir yang terdapat dalam al-Qur'an, terdapat tujuh kategori yang terkait dengan hukum:

1. Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging Qurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji.
2. Fakir yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang di uruskan dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas.
3. Fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi yang lain.
4. Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bantuan atau santunan.
5. Fakir yang termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat.
6. Fakir yang berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah.
7. Fakir yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja.

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur.
2. Orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.
3. Orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri).
4. Orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja.
5. Orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram.
6. Orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh menerima harta dari rampasan perang.
7. Orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh bersal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata "siyasah" berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan,

meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansiyang menyatakan bahwa siyasah adalah “ pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’ ”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁴

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 2-4

sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁵

2. Dasar-Dasar Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.²⁶ Para tokoh muslim berpendapat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama usul fiqh, as-Sunnah dalam pengertian istilah

²⁵Ibid, h.177-178.

²⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), h.274

ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum.²⁷

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) Fi'li, yaitu perbuatan Nabi
 - b) Qauli, yaitu perkataan Nabi
 - c) Taqriri, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
 - a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
 - b) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indera.
 - c) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.²⁸

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 32.

²⁸ *Ibid*, h. 33.

3) Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur'an atau Hadis.

Ijma' dibagi menjadi dua diantaranya:

- a) Ijma' *qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'i al-dalalah* itu adalah ijma' sarih. Ijma' ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- b) Ijma' *zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma' ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan ijma' ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma' macam yang kedua ini adalah ijma' sukuti.

4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun qiyas terbagi dalam:

- a) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang 'illat hukum bacaannya (*far'u*) lebih kuat daripada 'illat hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.
- b) *Qiyas mushawi* adalah qiyas yang kekuatan 'illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga

dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *'illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia akan menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *al-asal*. Adanya kesamaan *illat* tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan nash tersebut kedalam kategori *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat dari pada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*.

Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

- c) Qiyas al-adhaf adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risallah*, Imam Syafi'i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan).

Dalam kitab *Manaqib asy-syafi'i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah daripada *illat* pada hukum asal.

3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Abul A'la al-maududi menafsirkan dustur dengan :

صَكِّنْطَوِيْعَلَالْأَسَاسِيَّةَ التَّيْفُومُعَلِيْهَا نَظَامُ دَوْلَةٍ

Artinya: “sesuatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”²⁹

Abul A'la al-maududi hanya mensyaratkan 4 syarat dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, dan warga negeri Islam. Sangat jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seseorang al-imam al-adham (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit tampaknya lebih realistis.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan

²⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 52-53.

atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wizarah*, *waliyul ahdi*, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah diumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁰
- d. Bidang *siyasah idariyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Fiqh siyāsah dusturiyyāh merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 158

kebutuhannya. Berkaitan dengan tugas pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan dalam sebuah negara dalam siyasah dusturiyah merupakan tugas dari *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yang mana jika dikaitkan dengan pemerintahan di Indonesia tugas ini diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara. Secara umum siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Imamah

Secara etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata : imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.

Menegakkan *imamah* merupakan sebuah kewajiban besar di dalam agama, karena manusia itu membutuhkan persatuan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mustahil akan terwujud terkecuali jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin saat melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu demi terwujudnya sebuah kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemunkaran.

b. Rakyat dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada pula yang disebut

musta'min. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Kafir *dzimmi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik, sedangkan *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Namun persamaan bagi kedua-duanya adalah non muslim. Adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah sebagai berikut:³¹

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.³²

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*h.98.

³² *Ibid*, h. 99.

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

c. *Ba'iat* (Janji Setia)

Bai'at (*mubaya'ah*), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan: ³³“Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at*.”

Pembai'atan dilakukan setelah terjadinya *permusyawaratan* penentuan seorang imam (pemimpin) setelah mencapai kesepakatan. Apabila cara *musyawarah* tidak menghasilkan kesepakatan, maka *imam* dapat *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*. Apabila setelah *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, maka

³³ *Ibid*, h.100-101.

golongan minoritas pun harus tetap mentaati dan membantu imam, dan tidak boleh berusaha menjatuhkan imam, kecuali kalau imam melakukan kekafiran yang nyata.

d. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*

Menurut bahasa *al-'Ahd* berarti “semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Ahdi*” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membai'atnya* sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli *siyāsah syar'iyah*, *al-'Ahd* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-'Ahd* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.

e. *Wizarah* (Kementrian)

Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*.

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁴

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri''iyyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha''iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada''*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada''* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma''ruf* ketika yang *ma''ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.

³⁴*Ibid*, h.29

Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.³⁵ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.³⁶

³⁵Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.113.

³⁶*Ibid*, h.114.

4. Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqih siyasah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah siyasah tasyri'iyyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Tugas *al- sulthan tanfidziyyah*³⁷ adalah menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara Pemerintah wajib implementasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut. Sebagaimana hadits Nabi berikut:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ
أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: "Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amir-ku maka

³⁷Ibnu Syarif, Mujar, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam...*, h. 16.

sungguh ia telah durhakakepadaku".³⁸

Dalam hal fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin oleh pemerintahan terkait yang berperan sebagai *tanfidziyyah syar'iyah* yaitu pelaksana dari undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Oleh karena itu melalui program kerjanya, Pemerintah Indonesia dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung jawab pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup kekuasaannya, apapun posisi dan perannya. Sebagaimana hadits nabiberikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasullulah SAW berkata: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditaya tentang kepemimpinannya,

³⁸Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz. IV..., h. 327.

penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.”³⁹

Dalam Islam, negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut al-Mawardi, pendirian negara ini didasarkan pada *Ijma'* ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan Khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau saranya itu hukumnya juga wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).⁴⁰

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja. Maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT

³⁹Muslim, Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t),h. 125.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 151-152.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج : ٤١)

Artinya :“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”⁴¹ (Q.S Al-Hajj [22]:41)

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip memuliakan manusia dan menjamin kemerdekaannya termasuk prinsip-prinsip dasar yang diserukan dalam syariat Islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam agama Islam ditegaskan bahwa

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسرا : ٧٠)

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna

⁴¹ Q.S Al-Hajj [22]:41

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁴² (Q.S al-Isra’ [17]:70)

Pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok anak terlantar dan fakir miskin sepanjang dana yang tersedia dapat mencukupi. Negara bukan saja mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat kecil saja, akan tetapi bertanggungjawab terhadap kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Sedangkan Ibnu Hazm menjelaskan kebutuhan pokok hidup bagi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Ia harus memiliki cukup makan untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat.
2. Ia harus mempunyai pakaian yang layak untuk berindung dari kedinginan dan kepanasan.
3. Ia harus mempunyai tempat tinggal yang baik untuk melindungi dirinya dari iklim yang kurang baik dan untuk bisa hidup mandiri.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian oleh Ahmad Rosyadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Hasil dari penelitian ini

⁴² Q.S al-Isra’ [17]:70

adalah untuk mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua dan masyarakat terhadap anak terlantar. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Dan data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif.⁴³

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Siti Hajar Reski Irawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintah Kota Makasar dalam memenuhi hak konstitusioanal fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data adalah metode deskritif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak konstitusioanal bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di kota Makassar yaitu dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa dengan Program Keluarga Harapan ini dipandang dapat meminimalisir fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan.⁴⁴

⁴³ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Persektif Hukum Islam dan Positif”, (Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

⁴⁴ Siti Hajar Reski Irawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar” (Skripsi Program Hukum Tata Negara Universitas Hassanudin, Makassar, 2013)

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Muhammad Zamroji yang berjudul “Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam beserta persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian ini adalah bahwa antara hukum positif dan hukum islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada.⁴⁵

Berdasarkan penelitian di atas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul

“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)”

⁴⁵Muhammad Zamroji yang berjudul “Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri, TulungAgung, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anna, Lintje Marpaung, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Biljana, Vilta Bernadethe dan Yana Saryana, *Tinjauan Hukum dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, edisi II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasbi, Al-Furqan, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Ibn-al-As'at, Sulaiman Abu Daud as-sigistani, *Sunan Abu Daud*, Kairo, Mesir: Dar al-Fajr litturats, 1984
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jeddawi, Murtir, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011
- Khomsan, Ali, Dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

- Krisnayuda, Backy, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Makarao, Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta: 2014.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Maulina, Nugraha Setya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina, 2007.
- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Munaldus, *Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Union, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) Korupsi Yang Memiskinkan*, Jakarta: . PT. Kompas Media Group, 2011
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nugroho, Heru, *Keluar Dari Lingkaran Kemiskinan di Indonesia*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Jakarta: PT. Kompas Media Group, 2011.
- Nur, Muh El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Jakarta: PT Balai Pustaka (persero), 2010.
- Saiful, Teuku Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, edisi terbaru, Jakarta: PT Asdi Mahatasya, 2017.
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ubaedillah, A, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Widodo, Wahyu, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

B. Sumber Online

Badan Pusat Statistik (Online), tersedia di:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (30 Maret 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Online), tersedia di: <http://www.kemenpppa.go.id> (27 maret 2020).

[Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar \(Online\)](https://www.iki.or.id/berita/kewajiban-konstitusional-negara-terhadap-fakir-miskin-dan-anak-terlantar), tersedia di: <https://www.iki.or.id/berita/kewajiban-konstitusional-negara-terhadap-fakir-miskin-dan-anak-terlantar> (01 Juli 2020)

C. Jurnal

Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Hak Anak, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.2, Desember 2013.

Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Asas*, Vol.6, No.2, Juli 2014

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.